



PENETAPAN RENCANA KERJA | **2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIJULANG**
Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296
Cijulang 46394



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN CIJULANG

Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Cijulang 46394

KEPUTUSAN

CAMAT CIJULANG

KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/Kpts.11.1-Kec/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Reban dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA** : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di : Cijulang
Pada tanggal : 26 Juli 2023
CAMAT CIJULANG



Hj. AYI ROHANAH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.11.1-Kec/2023
TANGGAL : 26 Juli 2023

**PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
- I. Kecamatan Cijulang
- B. Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut:
- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.


CAMAT CIJULANG
KECAMATAN
CIJULANG
Hj. AYI ROHANAH

DAFTAR ISI

	Hal
KEPUTUSAN CAMAT CIJULANG	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	13
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD	14
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	25
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V PENUTUP	36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran untuk Tahun anggaran 2024.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami berharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

CAMAT CIJULANG

Dra. Hj. AYIROHANA, M.Pd
NIP. 19671014 199512 2 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Penetapan Renja SKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Penetapan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Penetapan Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Renja Pembangunan Daerah (Penetapan Renja RKPD).

Penetapan Renja SKPD adalah dokumen Rancangan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Penetapan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Penetapan Renja Kecamatan Cijulang tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Penetapan Renja Tahun 2024 Kecamatan Cijulang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) untuk tahun 2024 yang merupakan dokumen awal Perencanaan Kecamatan Cijulang untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Cijulang secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Cijulang;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Cijulang;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen Rancangan perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Penetapan Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Rancangan Rencana Kerja.

1.1 Latarbelakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah:

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Kecamatan Cijulang berdasarkan Renstra Kecamatan Cijulang Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 4 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perkiraan pelaksanaan DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang baru disahkan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu

Pada tahun 2022 Kecamatan Cijulang melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.457.930.044,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribuan Empat Puluh Empat Rupiah),

kemudian dilakukan penjabaran APBD sehingga menjadi Rp1.422.985.433,-(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), kemudian pada saat anggaran perubahan menjadi Rp 1.435.485.433 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.220.032.264 atau persentase sebesar 84,99%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Cijulang, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Cijulang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan Cijulang									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%							
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%							
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%							
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%							

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	0,42
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	100%	10 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	0,45
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	60 Dokumen	180 Dokumen	0,50

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	0,20
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	5 Laporan	10 Laporan	0,40
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%							
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	0,50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	6 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	0,33

		beserta Atribut Kelengkapan								
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	72 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	0,50
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	10 Orang	10 Orang	0,20
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,50
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 Dokumen	48 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	48 Dokumen	111 Dokumen	0,39

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	0,25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.357 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	108,33%	326 Laporan	341 Laporan	0,25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	0,05
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit	200%	12 Unit	14 Unit	0,64
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320 Laporan	240 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100%	240 Laporan	600 Laporan	0,45

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	72 Laporan	0,50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	0,50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%							
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	0,47
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	3 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	14 Unit	27 Unit	0,32
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	2 Unit	0,40
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%							

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%								
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	16 Laporan	0,40	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%								
7.01.02.2.02.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	18 Laporan	0,75	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%								

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%	7 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	0,50	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%								
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	42 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	-	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%								

7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	42 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	-
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%							
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	18 Dokumen	0,75
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	0,40
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Dokumen	18 Laporan	0,75

Cijulang, 14 Januari 2023

Camat Cijulang



Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd

NIP.19671014 199512 2 002

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Cijulang berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2022, sasaran dari capaian kinerja meliputi:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai LHE AKIP Kecamatan Cijulang			88.80 %	89.00 %	89.20 %	89.40 %	88.60 %	43.80 %	67.72 %	89.40 %	
2.	Indeks Pelayanan Publik			75.00 %	80.00 %	85.00 %	90.00 %	89.00 %	90.55 %	90.00 %	92.00 %	
3.	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cijulang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Cijulang harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD dapat diketahui dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu 85,74%, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan terhadap Rancangan dapat direalisasikan. Dalam menunjang pelaksanaan Rancangan RKPD menurut identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan setelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31: Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Cijulang.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Kecamatan Cijulang

Tabel T-C.31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Duna Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Cijulang				3.000.360.104	Kecamatan Cijulang				2.903.622.192	
	Unsur Kewilayahan Kecamatan				485.708.151	Kecamatan				479.845.860	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	335.598.900	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	335.556.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	304.735.200	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	304.730.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	304.735.200	Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	304.730.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	30.863.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	30.826.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	30.863.700	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	30.826.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	10.424.951	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	4.976.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	10.424.951	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	4.976.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cijulang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.424.951	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cijulang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.976.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.279.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.276.000	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.279.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	6.276.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7 Laporan	6.279.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7 Laporan	6.276.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	17.532.900	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6.702.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	17.532.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	6.702.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	17.532.900	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	6.702.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	115.872.400	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	126.335.860	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	115.872.400	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	126.335.860	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	41.658.700	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	41.658.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	43.350.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	43.349.860	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	30.863.700	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	41.328.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Non Urusan					Non Urusan					
	Non Urusan				2.514.651.953	Non Urusan				2.423.776.332	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	2.514.651.953	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	2.423.776.332	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	84.101.815	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	61.894.840	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	64.351.815	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	42.145.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Koordinasi dan Penyusunan	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil	1 Dokumen	3.950.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil	1 Dokumen	3.950.000	

	Dokumen RKA-SKPD		koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			Dokumen RKA-SKPD		koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	3.950.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	3.949.840	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	1.573.202.898	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	1.550.995.853	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cijulang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.484.875.093	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cijulang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / Bulan	1.484.875.093	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	64.351.815	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	42.145.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	940.984	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	940.880	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	23.035.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	23.034.880	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	64.351.815	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	42.145.000	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	64.351.815	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42.145.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	105.252.446	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	101.023.174	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	13.209.446	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10.532.214	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	28.993.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	28.991.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	10 Dokumen	3.049.200	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	10 Dokumen	1.499.960	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cijulang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cijulang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	60.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	144.160.729	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	143.791.917	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.613.639	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.522.852	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.899.803	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	18.750.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	18.749.896	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	48 Dokumen	5.049.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	48 Dokumen	4.796.848	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Bahan / Material	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Cijulang	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	14.979.618	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	61.848.090	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	61.842.900	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	146.217.340	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	130.574.136	
Pengadaan Mebel	Kec. Cijulang	Jumlah Paket mebel yang diadakan	14 Unit	57.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Cijulang	Jumlah Paket mebel yang diadakan	14 Unit	49.636.438	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	72.217.340	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	70.260.304	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	10.677.394	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	272.543.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	272.155.915	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	2.886.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	2.880.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	60.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	56.000.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.937.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	213.275.915	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	124.821.390	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	121.195.497	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cijulang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	76.696.390	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cijulang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	76.695.497	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	32.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	32.500.000	

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirhabilitasi	1 Unit	15.625.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirhabilitasi	1 Unit	12.000.000	Disesuaikan dengan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibutuhkan
--	---------------	---	--------	------------	--	---------------	---	--------	------------	--

Cijulang, 05 Juni 2023
 CAMAT CIJULANG



Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd
 NIP. 19671014 199512 2 002

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Cijulang tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Cijulang				Tabel T-C.32	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>NIHIL</i>					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBLIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Cijulang dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Visi & Misi Bupati Pangandaran 2021-2026

Visi :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;

2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel;
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

1. Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting;
4. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan;
5. Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi;
6. Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Cijulang mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Cijulang maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Cijulang

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran**

Nama SKPD : Kecamatan Cijulang

Tabel T-C.33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7	Kecamatan Cijulang				2.903.622.192				3.173.774.660
07.01	Unsur Kewilayahan								
	Kecamatan				479.845.860				468.722.664
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	335.556.000			100%	343.236.789
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	304.730.000			100%	310.829.904

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkatn Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkatn Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cijulang	12 Laporan	304.730.000	APBD Kab	Baru	12 Laporan	310.829.904
07.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	30.826.000			100%	32.406.885
07.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	4 Laporan	30.826.000	APBD Kab	Baru	4 Laporan	32.406.885
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	4.976.000			100%	6.227.500
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	4.976.000			100%	6.227.500

07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cijulang	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.976.000	APBD Kab	Baru	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.227.500
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	6.276.000			100%	6.592.950
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100%	6.276.000			100%	6.592.950
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Cijulang	7 Laporan	6.276.000	APBD Kab	Baru	7 Laporan	6.592.950
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	6.702.000			100%	8.088.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		100%	6.702.000			100%	8.088.000

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Cijulang	7 Dokumen	6.702.000	APBD Kab	Baru	7 Dokumen	8.088.000
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	126.335.860			100%	104.577.425
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	126.335.860			100%	104.577.425
07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cijulang	4 Dokumen	41.658.000	APBD Kab	Baru	4 Dokumen	32.406.885
07.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cijulang	1 Dokumen	43.349.860	APBD Kab	Baru	1 Dokumen	39.763.655

07.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	4 Dokumen	41.328.000	APBD Kab	Baru	4 Dokumen	32.406.885
	Non Urusan								
	Non Urusan				2.423.776.332				2.705.051.996
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100%	2.423.776.332			100%	2.705.051.996

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100%	61.894.840			100%	63.221.475
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Cijulang	4 Dokumen	42.145.000	APBD Kab	Baru	4 Dokumen	54.839.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec. Cijulang	1 Dokumen	3.950.000	APBD Kab	Baru	1 Dokumen	1.754.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec. Cijulang	1 Dokumen	3.950.000	APBD Kab	Baru	1 Dokumen	1.754.500

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kec. Cijulang	1 Dokumen	3.950.000	APBD Kab	Baru	1 Dokumen	1.754.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kec. Cijulang	1 Dokumen	3.950.000	APBD Kab	Baru	1 Dokumen	1.754.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Cijulang	5 Dokumen	3.949.840	APBD Kab	Baru	5 Dokumen	1.364.275
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100%	1.550.995.853			100%	1.752.890.676
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cijulang	10 Orang / Bulan	1.484.875.093	APBD Kab	Baru	10 Orang / Bulan	1.671.677.887
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Cijulang	60 Dokumen	42.145.000	APBD Kab	Baru	60 Dokumen	54.839.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	Kec. Cijulang	1 Laporan	940.880	APBD Kab	Baru	1 Laporan	1.035.082

		penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD							
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Cijulang	5 Laporan	23.034.880	APBD Kab	Baru	5 Laporan	25.338.507
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%	42.145.000			100%	54.839.200
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cijulang	12 Laporan	42.145.000	APBD Kab	Baru	12 Laporan	54.839.200
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		100%	101.023.174			100%	108.923.571
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Cijulang	1 Paket	10.532.214	APBD Kab	Baru	1 Paket	14.530.391

7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Cijulang	12 Dokumen	28.991.000	APBD Kab	Baru	12 Dokumen	31.893.180
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kec. Cijulang	10 Dokumen	1.499.960	APBD Kab	Baru	10 Dokumen	2.500.000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Cijulang	10 Orang	60.000.000	APBD Kab	Baru	10 Orang	60.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	143.791.917			100%	150.679.923
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	5.522.852	APBD Kab	Baru	1 Paket	4.187.444
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	37.899.803	APBD Kab	Baru	1 Paket	35.199.580
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	18.749.896	APBD Kab	Baru	1 Paket	22.500.000

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Cijulang	48 Dokumen	4.796.848	APBD Kab	Baru	48 Dokumen	5.760.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	14.979.618	APBD Kab	Baru	1 Paket	15.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cijulang	340 Laporan	61.842.900	APBD Kab	Baru	340 Laporan	68.032.899
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	130.574.136			100%	151.400.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang diadakan	Kec. Cijulang	14 Unit	49.636.438	APBD Kab	Baru	14 Unit	60.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Cijulang	4 Unit	70.260.304	APBD Kab	Baru	4 Unit	90.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Cijulang	17 Unit	10.677.394	APBD Kab	Baru	17 Unit	1.400.000

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100%	272.155.915			100%	299.767.872
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cijulang	240 Laporan	2.880.000	APBD Kab	Baru	240 Laporan	3.174.600
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Cijulang	24 Laporan	56.000.000	APBD Kab	Baru	24 Laporan	66.762.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Cijulang	12 Laporan	213.275.915	APBD Kab	Baru	12 Laporan	229.831.272
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100%	121.195.497			100%	123.329.279
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Cijulang	5 Unit	76.695.497	APBD Kab	Baru	5 Unit	84.366.029
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Cijulang	14 Unit	32.500.000	APBD Kab	Baru	14 Unit	20.963.250

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Cijulang	1 Unit	12.000.000	APBD Kab	Baru	1 Unit	18.000.000
-----------------	--	--	---------------	--------	------------	----------	------	--------	------------

Cijulang, 05 Juni 2023

CAMAT CIJULANG



Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd

NIP. 19671014 199512 2 002

BAB IV

PENETAPAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatannya di jelaskan dalam RKA Kecamatan Cijulang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.514.651.953,-, membidangi:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berupa Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan/material serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp 335.598.900,-, membidangi:
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan berupa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan berupa peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 10.424.951,- membidangi:
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 6.279.000,- membidangi:
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 17.532.900,- membidangi:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah berupa Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 115.872.400,- membidangi:
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berupa fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Cijulang Tahun 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Demikian Penetapan Renja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Penetapan Renja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Cijulang yang terdepan dalam agribisnis dan destinasi wisata yang mendunia dengan tetap mempertahankan agama sebagai pandangan hidup di tahun 2025, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk **"PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTERISTIK BANGSA"**.

Cijulang, 28 Juli 2023
CAMAT CIJULANG

Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd
NIP. 19671014 199512 2 002

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIJULANG**

Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Cijulang 46394

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Breafing staf
Tanggal : 29 Juli 2023
Waktu : 08.00 wib
Tempat : Ruang Camat Cijulang

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Hj. Ayi Rohanah	Camat	Kec. Cijulang	
2	Undarp. S	Sekret	Kec. Cijulang	
3	M. Yusuf	Kasi Per	"	
4	Tatang H	Kasi PMD	Kec. Cijulang	
5	Dessy S	Kambas Keu	"	
6	Entin. S	PD	"	
7	Mel Muliwa	Kabang Umum	"	
8	Dani Hermiyanti	op	"	
9	Sudat p		Kec. Cijulang	
10	DIKT WAHTUDI	Staf	Kor. Cij	
11	Santi Fitriani	Staf	Kec. Cijulang	
12	Wawan H.	KTP	"	
13	Mumu TAUFIB S	op	"	
14	Nawani Setiawan S	Op. Paten	"	
15	Sutarman	Tenaga Kebersihan	"	
16	Dea	op	"	
17	Juju. J.	Staf.	"	
18				
19				
20				
21				

Camat Cijulang

Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd
NIP. 19671014 199512 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN KECAMATAN CIJULANG

Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Cijulang 46394

NOTULEN

Penyusunan Penetapan Reraja tahun 2024 harus dilaksanakan paling lambat minggu ke-4 bulan Juli 2023 dan disampaikan ke Bappeda. Dalam penyusunan Penetapan Reraja tahun 2023 dijabarkan secara umum sasaran program dan kegiatan Kecamatan Cijulang dengan rincian:

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Rp 309.730.000;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dibebankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Rp 30.826.000;
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Rp 4.976.000;
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Rp 6.276.000;
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Rp 6.702.000;
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp 126.335.860;
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 61.894.840;
 - Administrasi keuangan perangkat daerah Rp 1.550.990.853;
 - Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Rp 42.145.000;
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp 101.023.174;
 - Administrasi umum perangkat daerah Rp 143.791.917;
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 130.574.136;
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 272.155.915;

- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 121.195.497;

Dari hasil analisa kebutuhan tersebut pagu usulan penetapan Renja tahun 2024 yaitu Rp 2.903.622.192;

Cijulang, 29 Juli 2023

Notulen



DEWI HERMIYANTI

DOKUMENTASI

